



PENGUKURAN RENCANA AKSI



2022

**KECAMATAN DUA BOCCOE
KABUPATEN BONE**

PENGUKURAN RENCANA AKSI KECAMATAN DUA BOCCOE TAHUN 2022

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/PROSES	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2021				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022				FAKTOR		TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	KEBERHASILAN	KEGAGALAN	SOLUSI DAN REKOMENDASI
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1 (%)	TW 2 (%)	TW 3 (%)	TW 4 (%)	TW 1 (%)	TW 2 (%)	TW 3 (%)	TW 4 (%)	PENDUKUNG	PENGHAMBAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Dua Boccoe	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah	Persentase	100	11,113,025,510	2,204,152,352	3,043,212,644	2,865,536,878	2,951,369,039	25	25	25	25	19.83	27.38	25.79	26.56	25	25	25	25	Adanya upaya dalam meningkatkan kinerja dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah	Belum optimalnya kualitas kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	adanya Peningkatan Kinerja dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	Meningkatnya kualitas kegiatan penunjang urusan umum khususnya pada penyusunan laporan capaian kinerja	Kurangnya Kualitas SDM dalam Melaksanakan pengkordinasian urusan pemerintah daerah	Tingkatkan Kinerja Pelayan sesuai SOP
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang Dilaksanakan sesuai standar Pelayanan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program Teknis Perangkat Daerah	Persentase	100	22,560,670	9,012,380	3,203,200	7,545,090	2,800,000	100	0	0	0	39.95	14.20	33.44	12.41098	100	0	0	0	Adanya upaya untuk menyelesaikan laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belum Optimalnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	adanya Ketetapan Waktu dalam Hal Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	Masyarakat bisa meningkatkan hasil realisasi pembangunan melalui kegiatan musrenbang	Masih terdapatnya usulna-usulan masyarakat yang belum bisa dilaksanakan pada tahun sebelumnya	Penyesuaian waktu dalam melakukan laporan perencanaan
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	2	10,079,400	3,162,200	2,290,900	1,826,300	2,800,000	100	0	0	0	31.37	22.73	18.12	27.78	5,000	0	0	0	Adanya komitmen Aset dalam menyiapkan SSH secara tepat waktu	Usulan Perencanaan kadang terhambat oleh terlambatnya Ketersediaan Satuan standar harga (SSH)	adanya Ketersediaan Satuan Standar Harga Sebelum Menyusun Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Bagian Program dan Keuangan	Dokumen perencanaan sudah bisa di update tepat waktu	terlambutan penyediaan SSH oleh Aset	Kordinasi dengan bagian keuangan Di Daerah masalah SSH
			Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2,635,640	1,474,070	0	1,161,570	0	100	0	0	0	55.93	0	44.07	0	10,000	0	0	0	Ketersediaan SSH secara tepat waktu	Seringnya mengubah RKA karena adanya sub Kegiatan yang di geser akibat adanya Dana Penanganan Covid 19	adanya Ketersediaan Satuan Standar Harga Sebelum melakukan Pergeseran Dana	Sub Bagian Program dan Keuangan	Pengimputan RKA di aplikasi SIPD sudah tepat waktu	sering terjadinya pergeseran dana antar sub kegiatan	kejeluan Standar harga yang harus ada sebelum melakukan pergeseran Dana
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2,895,220	1,378,560	0	1,516,660	0	100	0	0	0	47.62	0	52.38	0	10,000	0	0	0	Adanya perpanjangan waktu dalam pengimputan pada aplikasi sipd	Keterlambatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dikarenakan waktu yang kurang Efisien	Memfaatkan Waktu Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD Tepat waktu	Sub Bagian Program dan Keuangan	Penyusunan dokumen RKA didukung oleh perpanjangan waktu dalam pengimputan aplikasi SIPD	sering terjadinya pergeseran dana antar sub kegiatan dengan baik untuk penyusunan Perubahan RKA	pemanfaatan waktu harus diperimbangkan dengan baik untuk penyusunan Perubahan RKA
			Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	2,823,490	917,980	668,500	1,237,010	0	100	0	0	0	32.51	23.68	43.81	0	10,000	0	0	0	Tersedianya data dalam penyusunan laporan Capaian kinerja	Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD masih Terkendala oleh Kurangnya SDM Sehingga Penyusunan Laporan sering tidak tepat waktu	Di adakan Binbhangin Teknis bagi Penyusun Laporan LPDP dan LKJIP	Sub Bagian Program dan Keuangan	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan capaian kinerja	Kurangnya pemahaman tentang penyelesaian APIDANCE dalam Pengumpulan data	menemui orang - orang yang berkompeten dalam hal Penyusunan LPDP&LKJIP
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	4,126,920	2,079,570	243,800	1,803,550	0	100	0	0	0	50.39	5.91	43.70	0	10,000	0	0	0	Adanya upaya dalam melengkapi dan memperbaiki laporan evaluasi kinerja pegawai	Kurangnya Dokumen penunjang dalam hal penyelesaian Laporan evaluasi Kinerja Pegawai	Adanya dokumen pendukung untuk menjadi bahan penyelesaian Laporan	Sub Bagian Program dan Keuangan	Penyediaan dokumen laporan evaluasi kinerja sudah bisa di update tepat waktu	Masih kurangnya data pendukung yang memadai	agar kesiapan Dokumen pendukung memadai
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase	100	10,714,828,750	2,130,264,933	2,953,094,785	2,794,152,043	2,789,062,811	25	25	25	25	19.88	27.56	26.08	26.03	25	25	25	25	Adanya upaya Bidang Keuangan daerah dalam meminiratkan pagu anggaran tiap tahunnya	Terjadinya perubahan pagu anggaran yang signifikan	Adanya kesesuaian pagu anggaran mengikti anggaran perubahan daerah	Sekertariat	Terbayarnya gaji/upah setiap ASN sesuai tugas dan tugasnya	Masih terdapatnya kekurangan gaji ASN yang belum dibayarkan tepat waktu	Kordinasi dengan Bagian Keuangan tentang Perubahan Pagu
			Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	10,714,828,750	2,130,264,933	2,953,094,785	2,794,152,043	2,789,062,811	25	25	25	25	19.88	27.56	26.08	26.03	2,500	13	2,500	2,500	Kelebihan pagu anggaran selalu dikembalikan setiap akhir tahun penganggaran	Sering terjadinya kelebihan Pagu anggaran	Di adakan kesesuaian pagu anggaran supaya tidak terjadi pengembulan dana	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Terbayarnya gaji/upah setiap ASN sesuai beban tugasnya	Masih terdapatnya kekurangan gaji ASN yang belum dibayarkan tepat waktu	perhitungan yang matang dalam hal melakukan perencanaan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Perangkat Daerah	persentase	100	5,000,000	5,000,000	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	Adanya upaya dalam Bidang Kepegawaian dalam hal pemenuhan kebutuhan pegawai	Belum optimalnya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan pegawai dalam Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Sekertariat	Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan Kepegawaian	Masih terbatasnya pemenuhan Pakaian hari hari tertentu bagi pegawai	Perlu peningkatan dalam hal peningkatan pemenuhan administrasi kepegawaian

			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelegkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelegkapannya	Steel	10	5,000,000	5,000,000	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	1,000	0	0	0	Adanya upaya pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu dan atributnya bagi pegawai	Masih Terbatasnya Pemenuhan Kebutuhan Pegawai dalam hal Pengadaan Pakaian Dinas	Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu beserta atributnya sesuai dengan apa yang dianggarkan	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tersedianya Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu bagi pegawai	Masih terbatasnya pengadaan pakaian hari hari tertentu bagi pegawai	Perlu diadakan pemenuhan pakaian dinas dan pakaian khusus hari hari tertentu secara rutin dan periodik
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase	100	160,178,860	24,948,740	45,206,720	22,386,280	67,237,120	25	25	25	25	15.58	28.22	13.98	41.98	25	0	25	25	Adanya Upaya dalam mengoptimalkan pengelolaan Administrasi umum perangkat daerah	Belum optimalnya Pelaksanaan Administrasi umum perangkat daerah	Adanya kelengkapan pengadministrasian umum yang memadai	Sekretariat	Ketersediaan tenaga SDM pendukung administrasi kecamatan	Kurangnya koordinasi internal dan masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi yang diemban	perlu melengkapi administrasi di Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kegiatan	2	34,079,550	5,800,280	7,608,310	4,029,600	16,241,360	25	25	25	25	17.02	22.33	11.82	47.6572	1,250	1,250	1,250	1,250	Adanya upaya dalam pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor secara berkala	Terkadang kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik	Peralatan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kebutuhan kantor	Seksi Pelayanan Umum	Tersedianya peralatan dan perlengkapan penunjang urusan administrasi perkantoran	Perlu penambahan dana dalam pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor secara berkala	pendataan kebutuhan peralatan dan perlengkapan pegawai setiap ruangan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kegiatan	2	96,989,060	13,080,610	28,959,060	14,479,680	40,469,710	25	25	25	25	13.49	29.86	14.93	41.72606	1,250	1,250	1,250	1,250	SSH masih terus diperbaharui oleh ASET	Kurangnya bahan makanan di SSH aset pada aplikasi	Penyempurnaan Standar harga yang signifikan pada aplikasi	Seksi pelayanan Umum	Penyediaan makana dan minuman kantor bisa terpenuhi	Perlu penambahan SSH bahan Makanan di aplikasi aset	kesesuaian SSH yang harus disempurnakan terlebih dahulu
			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penunjan Administrasi Perkantoran Sesuai	Kegiatan	2	13,070,250	2,167,850	3,789,350	2,377,000	4,736,050	25	25	25	25	16.59	28.99	18.19	36.24	1,250	1,250	1,250	1,250	Adanya upaya perbaikan dokumen perencanaan dan penganggaran	Penggandaan dokumen tersebar di beberapa sub kegiatan	penggandaan dokumen seharusnya terpusat pada satu sub kegiatan	Seksi pelayanan Umum	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai rencana kebutuhan	Penggandaan dokumen masih tersebar di berbagai sub kegiatan	agar kesesuaian kode rekening dengan beberapa Sub kegiatan
			Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kali	12	2,040,000	400,000	350,000	0	1,290,000	25	25	25	25	19.61	17.16	0	63.24	208	208	208	208	Adanya Pengarsipan perundang undangan	Kurangnya minat baca terhadap bucan perundang - undangan	meningkatnya minat baca pada pegawai asn dan Non asn di Kecamatan	Seksi pelayanan Umum	Terbayanya media yang menyediakan bahan bucan kantor	Kurangnya pengarsipan terhadap bahan bacaan dan perundang-undangan	agar Minat Baca pada ASN dan Non Asn di Kantor ditingkatkan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Ilaporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan SKPD	Kegiatan	275	14,000,000	3,500,000	4,500,000	1,500,000	4,500,000	25	25	25	25	25.00	32.14	10.71	32.14	9	9	9	9	Adanya Upaya untuk menambah SPDP sesuai Kebutuhan	Pemberian SPDP tidak menyeluruh di tiap Kepala seksi	Perlu diadakan pembagian spdp pada semua kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian	Seksi pelayanan Umum	Terlaksananya kegiatan rutinKoordinasi dan konsultasi SKPD	Masih kuranya pemenuhan SPDP	Agara dilakukan pembagian Tugas kepada Pegawai untuk mengikuti acara / rapat di luar Kantor
			Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase	100	51,497,500	0	0	25,080,000	26,417,500	0	100	0	0	0	0	48.70	51.30	0	0	0	0	Adanya upaya pengadaan barang	Pengadaan Barang Belum sepenuhnya terpenuhi	Pengusulan Barang yang di inginkan sesuai dengan kebutuhan terpenuhi	Sekretariat	Tersedianya pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Masih perlu pengadaan barang milik daerah yang bermutu tinggi	Perlu diadakan pengusulan Barang yang sesuai dengan kebutuhan
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang Disediakan	Unit	2	8,317,500	0	0	6,900,000	1,417,500	0	100	0	0	0	0	82.96	17.04	0	0	0	0	Pengadaan mebel sudah dimasukkan dalam penganggaran setiap tahunnya	Jumlah Pengadaan Mebel setiap Tahunnya Masih Terbatas sehingga Mempengaruhi Stadar	Pengadaan barang sejenis mebel yang berkualitas baik dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kantor	Seksi Pelayanan Umum	Tesedianya Pengadaan mebel yang dibutuhkan	Masih perlu penambahan Pengadaan mebel dalam penganggaran	Perlu adanya Pengadaan mebel yang memiliki standar Penggunaan yang
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	43,180,000	0	0	18,180,000	25,000,000	0	100	0	0	0	0	42.10	57.90	0	0	0	0	Pengadaan kendaraan dinas operasional bisa dimasukkan dalam penganggaran tahun berikutnya	Jumlah Pemakaian Bahan bakar minyak yang Tidak Menentu di setiap kali pemakaian yang dibarengi dengan kurangnya Kendaraan Operasional Kecamatan	Penambahan kendaraan Dinas untuk Operasional Pelayanan kepada masyarakat dan Memperlancar kegiatan Kecamatan	Seksi Pelayanan Umum	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tidak adanya kendaraan dinas operasional	Agar dilakukan kordinasi dengan Pimpinan entang Penambahan Kendaraan Operasional
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase	100	127,568,670	28,253,099	30,764,939	14,973,465	53,552,748	25	25	25	25	22.15	24.12	11.74	41.98	25	0	25	25	Adanya upaya pengelolaan penyediaan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Kurang maksimalnya Pengelolaan penyediaan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	kesesuaian dalam pengelolaan penyediaan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah terlaksana dengan baik	Sekretariat	Tersedianya sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Kurang maksimalnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang urusan	Agar diperbukan adanya kesesuaian dalam pengelolaan penyediaan sarana prasarana
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rekening	48	25,280,670	5,683,199	7,290,839	3,826,865	8,455,348	25	25	25	25	22.48	28.84	15.14	33.45	52	0	52	52	Adanya data dan informasi tentang kesesuaian pemakaian listrik setiap bulannya	Karena Adanya Jumlah Pemakaian Listrik Yang Tidak Menentu di setiap bulan, Akhirnya Mempengaruhi Jumlah Anggaran Yang	Jumlah Pemakaian antara pemakaian Pelayanan Kinerja yang ada setiap bulannya.	Sub Bagian Program dan Keuangan	Terbayanya pemakaian listrik kantor	Perlu Adanya kesesuaian daya dengan jumlah pelayanan kinerja yang ada setiap bulannya	Perlu Adanya Pemakaian Daya dengan Pelayanan Kinerja yang ada

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Pelayanan Umum/administrasi Keuangan selama setahun	OB	336	102,288,000	22,569,900	23,474,100	11,146,600	45,097,400	25	25	25	25	22.07	22.95	10.90	44.09	7	0	7	7	Iuran jaminan kesehatan bagi tenaga honorer sdh dimasukkan dalam penganggaran	Adanya Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Tenaga Honorer yang Pembayaran tidak Sesuai di Setiap Bulannya	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Honorer yang Merata Tiap Bulannya	Sub Bagian Program dan Keuangan	Terbayarnya iuran jaminan kesehatan bagi tenaga honorer	Belum adanya ketetapan standar pembayaran iuran jaminan kesehatan	Perlu adanya kordinasi dengan Pihak terkait Ketetapan Standar Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan
			Pmeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase	100	31,391,060	6,673,200	10,943,000	1,400,000	12,298,860	25	25	25	25	21.26	34.86	4.46	39.18	25	0	25	25	Adanya upaya dalam pemeliharaan barang milik daerah	Kurang maksimalnya pemeliharaan Barang Milik Daerah	pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Sekretariat	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	Perlu penambahan dana dalam pemeliharaan barang milik daerah	Perlu diupayakan sebaik mungkin terhadap pemeliharaan Barang Milik Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	26,862,760	4,748,800	9,275,500	1,400,000	11,362,460	25	25	25	25	17.68	34.53	5.21	42.30	625	0	625	625	Adanya pemeliharaan kendaraan secara rutin	Pemeliharaan kendaraan yang terbatas dengan standar harga yang sudah di tentukan	peningkatan koordinasi dengan aset terkait dengan biaya pemeliharaan kendaraan kepad aset	Seksi Pelayanan Umum	Terlaksanya penyediaan jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Operasional	Masih kurangnya kordinasi dengan aset terkait biaya pemeliharaan kendaraan	perlu dilakukan koordinasi dengan aset terkait dengan biaya pemeliharaan kendaraan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Dirahabiltitas	Unit	2	4,528,300	1,924,400	1,667,500	0	936,400	0	100	0	0	42.50	36.82	0	20.68	0	0	0	0	Adanya upaya Pemeliharaan gedung kantor yang sudah secara bersama	Kurangan pekerja yang biasa melakukan pemeliharaan Gedung Kantor	Para pekerja yang lebih berkopeten dalam rangka pemeliharaan gedung kantor secara berkala	Seksi Pelayanan Umum	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	Tidak adanya pekerja yang bisa melakukan pemeliharaan kantor	Diperlukan pekerja yang bisa melakukan pemeliharaan gedung kantor
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase	100	22,891,400	22,891,400	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	Tersedianya SDM dalam melaksanakan pelayanan publik	Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	adanya kerjasama antar Tim dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam hal pelayanan Publik	Sekretariat	Tersedianya SDM dalam melaksanakan pelayanan publik	Masih kurangnya himtek/pelatihan dalam peningkatan mutu SDM	Diperlukan kerjasama antar Tim dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan
			koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	persentase	100	22,891,400	22,891,400	0	0	0	100	100	100	100	100	0	0	0	100	0	100	100	Adanya sop yang mengatur tupoksi pegawai	Kurangnya Koordinasi antar Opd Tekhnis	pembagian kerja Pegawai setiap hari dalam hal penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan	Sekretariat	Adanya SOP yang mengatur tupoksi pegawai	Perlu diadakan sosialisasi tentang tupoksi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	agar perlu pembagian kerja dalam hal penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait	Kegiatan	1	22,891,400	22,891,400	0	0	0	100	100	100	100	100	0	0	0	10,000	0	0	0	Adanya mekanisme pelaksanaan Musrenbang yang terus diperbaharui	Pada saat pelaksanaan Musrenbang terkadang OPD pulang sebelum kegiatan berakhir	perlu diadakan rapat Tim dalam pelayanan spdd OPD yang datang bermusrenbang	Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemerintahan	Pelaksanaan musrenbang setiap tahunnya dapat terlaksana dengan baik	SKPD yang datang bermusrenbang sebelum acara selesai	perlu diadakan rapat Tim dalam pelayanan spdd OPD yang datang bermusrenbang
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase	100	191,899,980	10,870,730	14,790,470	146,926,790	19,308,990	100	0	0	0	5.66	7.71	76.56	10.06	100	0	0	0	Sering diadakan pembinaan pemberdayaan desa oleh kabupaten	Belum terpenuhinya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tepat waktu	Kerja sama Tim yang baik sehingga menghasilkan penyelesaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Sekretariat	Terlaksanya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	kurangnya sosialisasi dalam hal pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	agar perlu adanya kerja sama antar Tim dalam hal penyelesaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase	100	15,000,000	3,323,840	7,246,350	4,429,810	0	0	0	0	100	22.16	48.31	29.53	0	0	0	0	Adanya pembinaan yang sering diadakan di desa	Belum optimalnya kordinasi kegiatan pemberdayaan desa	adanya stekholder dan pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa	Sekretariat	Terlaksanya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	kurangnya sosialisasi dalam hal pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	adanya stekholder dan pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan	
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	1	15,000,000	3,323,840	7,246,350	4,429,810	0	0	0	0	100	22.16	48.31	29.53	0	0	0	0	Adanya FKKS yang selalu mengkomodir pokja desa sehat	Masih Kurangnya Kordinasi antar Desa sehingga Laporan Pokja Desa sering Terlambat yang mempengaruhi Keterlambatan Laporan FKKS	peningkatan Kordinasi dan Sinergitas antar Pokja Desa dan FKKS dalam Hal Penyusunan Laporan	Seksi Perekonomian PAD dan Kesra Seksi Pemangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pelaksanaan FKKS dapat berjalan dengan lancar	Perlu adanya pengkoordinasian dan sinergitas antar pokja desa dan FKKS	Kordinasi antar Pokja Desa dan FKKS dalam Hal Penyusunan Laporan	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase	100	176,899,980	7,546,890	7,544,120	142,496,980	19,308,990	0	100	0	0	4.27	4.26	80.55	10.92	0	0	0	0	Adanya SDM yang memberikan pelayanan publik	belum optimalnya kegiatan pemberdayaan Kelurahan	SDM yang berkompeten terhadap kegiatan pemberdayaan Desa	Sekretariat	Terlaksanya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kurang optimalnya SDM yang ada terhadap kegiatan pemberdayaan	agar mengoptimalka n SDM yang ada terhadap kegiatan pemberdayaan
			Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Paket	1	142,499,980	0	0	142,496,980	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	Tersedianya data dan informasi di kelurahan	Kelurahan belum Sepenuhnya memiliki Dokumen Perencanaan yang Ditetapkan sendiri oleh Pemerintah Kelurahan dalam Pelaksanaan	Mengkoordinasikan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap Kewenangan Kelurahan dalam Pengelolaan anggaran Pembangunan Sarana	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan Seksi Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat dan Desa	Terlaksanya sarana prasarana kelurahan	Adanya Pengurangan dana kelurahan sehingga berpengaruh terhadap pembangunan	agar berkoordinasi dengan Pihak terkait tentang Pembangunan sarana dan Prasarana di Kelurahan	

			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Dokumen	1	34,400,000	7,546,890	7,544,120	0	19,308,990	0	100	0	0	21.94	21.93	0	56.13	0	0	0	0	Aktifnya Pelaksanaan FKKS di kecamatan	kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan kelurahan Sehat	penyuluhan terhadap warga tentang Pola Hidup Sehat terlaksanaan dengan baik	Seksi Perekonomian PAD dan KESRA	Meningkatnya kegiatan Pokja Kelurahan sehat	Masih perlu diadakan penyuluhan terhadap warga tentang pola sehat	agar diadakan penyuluhan terhadap warga
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Persentase	100	27,000,000	6,750,000	6,750,000	4,500,000	9,000,000	100	100	100	100	25.00	25.00	16.67	33.33	100	100	100	100	Adanya kordinasi dengan TRIPIKA	Kordinasi dengan ketentraman dan ketertiban Umum belum optimal	Kordinasi dengan stekholder dan pihak terkait dalam hal kordinasi ketentraman dan ketertiban umum terlaksana	Sekretariat	Meningkatnya sistem pengawasan internal kecamatan	Perlu ditingkatkan kordinasi dengan Stakeholder dan pihak terkait dalam hal kordinasi	Diperlukan optimisasi terhadap stekholder dan pihak terkait dalam hal kordinasi
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	Persentase	100	27,000,000	6,750,000	6,750,000	4,500,000	9,000,000	25	25	25	25	25.00	25.00	16.67	33.33	25	25	25	25	Adanya kordinasi dengan TRIPIKA	belum optimalnya kordinasi penyelenggaraan ketentraman da ketertiban umum	Meningkatkan Kordinasi dengan stakeholder terkait	Sekretariat	Meningkatnya sistem pengawasan internal kecamatan	Perlu ditingkatkan kordinasi dengan Stakeholder dan pihak terkait	Diperlukan Peningkatan Kordinasi dengan Stakeholder Terkait
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kali	36	27,000,000	6,750,000	6,750,000	4,500,000	9,000,000	25	25	25	25	25.00	25.00	16.67	33.33	69	69	69	69	Adanya kordinasi dengan TRIPIKA	Kordinasi Lintas Sektor masih perlu ditingkatkan dalam rangka pengawasan yang lebih Komprehensif	Diadakannya Rapat Kordinasi Lintas Sektor Secara Rutin dan Berkala	Seksi Trantibun	Terbayarnya operasional laporan Tripika	Perlu diadakan rapat kordinasi lintas sektor secara rutin	diperlukan Rapat Kordinasi Lintas sektor
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa	Persentase	100	38,049,860	7,115,600	10,577,770	5,623,710	14,732,780	25	25	25	25	18.70	27.80	14.78	38.72	25	25	25	25	Adanya kegiatan rakor secara rutin	Belum sepenuhnya terpenuhi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	adanya Stakeholder dalam hal pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Sekretariat	Memmingkatnya pembinaan dan fasilitas pengelolaan dana desa	Masih ada beberapa desa yang terlambat dalam hal pencairan permohonan dana	agar melakukan pembinaan dan Pengawasan Desa
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa	Persentase	100	38,049,860	7,115,600	10,577,770	5,623,710	14,732,780	25	25	25	25	18.70	27.80	14.78	38.72	25	25	25	25	Adanya pelaksanaan monev secara berkala	Belum Optimalnya Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	partisipasi aktif bagi Kepala Desa dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Desa	Sekretariat	Terlaksanya pelaporan hasil fasilitasi, rekomendasi dan kordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kurangnya sosialisasi dalam hal pembinaan dan pengawasan desa	agar melakukan sosialisasi dalam hal pembinaan dan Pengawasan Desa
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Laporan	21	38,049,860	7,115,600	10,577,770	5,623,710	14,732,780	25	25	25	25	18.70	27.80	14.78	38.72	119	119	119	119	Aktifnya Pendamping desa dalam mengawal dan memfasilitasi desa dalam hal pembuatan laporan	Masih kurangnya partisipasi Desa dalam hal pelaporan pembuatan Peraturan Desa	Di adakan bimbingan teknis kepada para kepala desa dalam hal penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan Seksi Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat dan Desa	Terlaksanya pelaporan penyusunan, peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kurangnya partisipasi desa dalam hal peaporan pembuatan peraturan desa	agar menyampaikan Ke Desa dalam hal pembuatan Laporan



Camat Dua Bocore

ENDI MUSAFIR,S.Pi

Pangkat : Pembina

NIP. 197203042010011008